

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) terhadap pelanggaran khalwat di Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe merupakan Kota yang masih banyak ditemukan pelanggaran khalwat terutama di pondok- pondok tempat wisata, cafe, warung dan hotel. Khalwat merupakan perbuatan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat tertutup atau tersembunyi, yang dilarang dalam Syariat Islam karena dapat mengarah pada perbuatan zina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat Satpol PP dan WH serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui empat bentuk, yaitu: Pengawasan preventif, berupa sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Pengawasan internal melalui patroli dan razia langsung. Pengawasan eksternal melalui kerjasama dengan masyarakat dan sistem laporan publik. Pengawasan represif berupa tindakan hukum dan pembinaan terhadap pelanggar. Namun demikian, pengawasan belum berjalan optimal karena masih terdapat beberapa hambatan yaitu: keterbatasan sumber daya yang meliputi anggaran operasional, sarana dan prasarana. Hambatan berikutnya terdapat pada kepatuhan masyarakat terhadap penerapan Syariat Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan Satpol PP dan WH sangat bergantung pada peningkatan dukungan pemerintah daerah, ketersediaan fasilitas yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menegakkan norma Syariat Islam di Kota Lhokseumawe.

Kata Kunci: Pengawasan, Khalwat, Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Lhokseumawe

ABSTRACT

This study examines the supervision conducted by the Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) and Wilayatul Hisbah (WH) on khalwat violations in Lhokseumawe City. Lhokseumawe City is a city where khalwat violations are still prevalent, particularly in tourist spots, cafes, restaurants, and hotels. Khalwat refers to the act of being alone together between a man and a woman who are not mahram (close relatives) in a closed or hidden place, which is prohibited in Islamic Sharia as it can lead to adultery. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, where data is obtained through interviews, observations, and documentation of Satpol PP and WH officials as well as the community. The results show that supervision is carried out through four forms: preventive supervision through socialization and counseling to the community, internal supervision through patrols and direct raids, external supervision through community cooperation and public reporting systems, and repressive supervision through legal action and guidance for violators. However, supervision has not been optimal due to several obstacles, including limited resources such as operational budgets, facilities, and infrastructure. Another obstacle is the community's compliance with the implementation of Islamic Sharia. This study concludes that the effectiveness of supervision by Satpol PP and WH is highly dependent on increasing regional government support, adequate facilities, and active community participation in upholding Islamic Sharia norms in Lhokseumawe City.

Keywords: *Supervision, Khalwat, Islamic Sharia, Satpol PP and WH, Lhokseumawe.*